# The Link Between Corruption and the Growth of Main Sectors of the Indonesian Economy

# Keterkaitan Antara Korupsi dan Pertumbuhan Sektor-Sektor Utama Ekonomi Indonesia

# Yusuf Iqbal Fadzilah

***Abstract***

*Even though Indonesia is rich in natural resources, paradoxically, in an economic context, this country is less capable than its neighbors, one of which is due to the suboptimal quality of human resources. High levels of corruption are a concern, with the Corruption Perception Index (CPI) showing inadequate improvement. The World Bank and IMF define corruption as the abuse of authority for personal interests that is detrimental to the global economy. In the Indonesian context, corruption affects the growth of key economic sectors, damages government credibility, and reduces investor confidence. While key sectors have the potential to tackle corruption, they are also vulnerable to the practice. Thus, in-depth research on the relationship between corruption and economic growth in Indonesia is very important for the formation of more effective policies.*

*This study uses descriptive-qualitative methods to explore the relationship between corruption and the growth of the main economic sectors in Indonesia. Through the analysis of secondary data and various other sources, such as government reports and academic publications, we examine corruption indicators such as the Corruption Perception Index and economic data such as gross domestic product. A literature study approach is applied to obtain an in-depth understanding, with the aim of identifying patterns and impacts of corruption on economic growth so as to provide more effective policy recommendations in the future.*

*The research results show a significant relationship between the level of corruption and the growth of key economic sectors in Indonesia, with sectors dependent on licensing and regulation, such as mining, being more vulnerable to corruption. Although there is a view that corruption can make business easier, corruption actually damages the economy through impacts such as reduced investment, low-quality infrastructure, economic inequality, and increased poverty. Furthermore, the data highlights the positive impact of anti-corruption efforts on economic growth. The implication of these findings is the need for bureaucratic reform, increasing transparency, and strengthening supervisory institutions as keys to overcoming corruption and supporting sustainable economic growth in Indonesia, requiring cooperation between the government, the private sector, and civil society.*

***Keywords:*** *corruption, economic growth, corruption perception index (IPK)*

**Abstrak**

Meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alam, paradoksnya, dalam konteks ekonomi, negara ini kurang mampu dibandingkan tetangganya, salah satunya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Tingkat korupsi yang tinggi menjadi perhatian, dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan peningkatan yang belum memadai. Bank Dunia dan IMF mendefinisikan korupsi sebagai penyelewengan wewenang untuk kepentingan pribadi yang merugikan ekonomi global. Dalam konteks Indonesia, korupsi mempengaruhi pertumbuhan sektor ekonomi utama, merusak kredibilitas pemerintah, dan mengurangi kepercayaan investor. Meski sektor utama memiliki potensi untuk mengatasi korupsi, mereka juga rentan terhadap praktik tersebut. Sehingga, penelitian mendalam mengenai keterkaitan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat penting untuk pembentukan kebijakan yang lebih efektif.

Studi ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk mengeksplor hubungan antara korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia. Melalui analisis data sekunder dan beragam sumber lainnya seperti laporan pemerintah dan publikasi akademis, kami mengkaji indikator korupsi seperti Indeks Persepsi Korupsi dan data ekonomi seperti Produk Domestik Bruto. Pendekatan studi kepustakaan diterapkan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola dan dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

Hasil penelitian menunjukkan hubungan signifikan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia, dengan sektor-sektor bergantung pada perizinan dan regulasi, seperti pertambangan, lebih rentan terhadap korupsi. Meskipun ada pandangan yang menyatakan korupsi bisa mempermudah bisnis, korupsi justru merusak perekonomian melalui dampak seperti menurunnya investasi, kualitas infrastruktur yang rendah, ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kemiskinan. Selanjutnya, data menyoroti dampak positif dari upaya anti-korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan ini adalah kebutuhan untuk reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga pengawasan sebagai kunci dalam mengatasi korupsi dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia, membutuhkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil.

**Kata Kunci**: Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

### PENDAHULUAN

Meskipun Indonesia dikenal kaya akan sumber daya alam dan merupakan salah satu negara dengan keberagaman sumber daya terbesar di Asia, paradoksnya, dalam konteks ekonomi dan pembangunan, negara ini tidak dianggap sebagai salah satu yang kaya di kawasan ini. Sebaliknya, Indonesia sering dianggap kurang mampu dibandingkan tetangganya. Salah satu faktor utama yang menjadi penyebab kondisi ini adalah kualitas sumber daya manusia yang belum optimal, baik dari aspek pengetahuan maupun moralitas. Integritas dan kejujuran yang belum memadai menjadi salah satu indikator rendahnya kualitas tersebut. (Rachmawati, 2021) Indonesia, sebuah negara berkembang, masih dihadapkan pada tingkat korupsi yang cukup tinggi meskipun ada peningkatan pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di tahun-tahun tertentu. Pada 2015, IPK Indonesia meningkat menjadi 36, naik dari angka 32 pada 2013 dan 34 pada 2014. Meski ada kenaikan, Indonesia tetap berada di peringkat ke-88 menurut data dari Transparency International pada tahun 2017. Meski demikian, IPK tersebut berhasil dipertahankan hingga 2016. (Akman & Sapha, 2018)

Menurut Bank Dunia dan IMF, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi telah menjadi masalah global yang berdampak pada berbagai dimensi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi. Dalam laporannya, Bank Dunia (2008) mengestimasi bahwa korupsi mengakibatkan kehilangan lebih dari US$10 miliar, atau sekitar 5% dari GDP global setiap tahunnya. Sementara di Uni Afrika, kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 25% dari GDP negara-negara anggotanya. USAID menekankan bahwa korupsi menghambat perkembangan ekonomi. Di sektor bisnis, korupsi menambah beban biaya, seperti biaya suap, biaya tambahan dalam bernegosiasi dengan pejabat, dan risiko terkait ketidakpatuhan pada perjanjian. Walaupun demikian, ada argumen yang menyatakan bahwa korupsi dapat mengurangi beban birokrasi dan dengan demikian mengurangi biaya. (Nawatmi, 2014) Korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi Indonesia adalah dua aspek yang saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan negara ini. Indonesia, sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, pertambangan, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, korupsi telah lama menjadi masalah serius di Indonesia, yang dapat merusak integritas institusi, membatasi akses masyarakat terhadap layanan publik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Secara umum, banyak yang percaya bahwa korupsi menghambat kegiatan ekonomi dengan menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya yang seharusnya efisien. Banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa korupsi adalah salah satu hambatan terbesar terhadap perkembangan ekonomi suatu negara. Korupsi dikenal sebagai salah satu faktor utama yang menekan pendapatan dan memiliki peran signifikan dalam menciptakan siklus kemiskinan yang berkelanjutan. (Haqmi, 2019) Oleh karena itu, penelitian tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi Indonesia menjadi sangat penting untuk memahami dinamika perkembangan negara ini.

Pertama-tama, penting untuk mencermati bagaimana korupsi dapat memengaruhi pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi Indonesia. Berdasarkan penelitian Agus Ainul Falah dan Agus Suman, ditemukan bahwa ada hubungan yang relatif lemah namun positif antara pertumbuhan ekonomi dan korupsi. Selain itu, mereka menemukan bahwa korupsi memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ketika tingkat korupsi meningkat (ditandai dengan penurunan indeks persepsi korupsi), akan ada dampak negatif seperti penurunan investasi, berkurangnya minat investor, naiknya biaya produksi, penurunan kualitas infrastruktur publik, serta penurunan produktivitas. Semua hal ini berkontribusi pada penurunan pertumbuhan ekonomi, yang bisa dilihat dari penurunan produk domestik regional bruto per kapita suatu wilayah. (Haqiqi & Putra, 2020)

Selain itu, korupsi juga dapat merusak kredibilitas pemerintah dan mengurangi kepercayaan investor dalam ekonomi Indonesia. Investor cenderung enggan menanamkan modalnya dalam negara yang dipersepsikan korup, karena mereka khawatir investasinya akan terancam oleh praktek-praktek korupsi. Ini berdampak negatif pada pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, karena investasi asing maupun domestik menjadi kunci untuk menggerakkan sektor-sektor utama ekonomi.

Sementara itu, sektor-sektor utama ekonomi Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah korupsi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam sektor-sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong praktek korupsi. Namun, sektor-sektor ini juga rentan terhadap korupsi, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam seperti tambang dan kehutanan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana sektor-sektor utama ekonomi ini dapat berperan dalam mengurangi praktek korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai keterkaitan antara korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi Indonesia akan membantu menyediakan wawasan yang mendalam tentang masalah tersebut. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam memerangi korupsi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi, sehingga Indonesia dapat mencapai potensinya sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di kawasan Asia Tenggara.

### METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan analisis data sekunder dan pemanfaatan sumber data dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah, publikasi akademis, serta laporan lembaga internasional yang mengukur tingkat korupsi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data yang kami kumpulkan mencakup indikator-indikator korupsi, seperti Indeks Persepsi Korupsi (CPI), serta data yang berkaitan dengan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB) sektor-sektor tersebut. Selain itu, analisis dokumen juga digunakan untuk melacak evolusi kebijakan anti-korupsi dan reformasi ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Melalui pendekatan ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia. Analisis data sekunder ini akan memungkinkan kami untuk mengidentifikasi tren, pola, dan korelasi yang mungkin ada antara tingkat korupsi dan performa sektor-sektor ekonomi. Dengan cara ini, kami berharap dapat menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak korupsi pada pertumbuhan ekonomi, yang dapat berguna dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk memerangi korupsi dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia.

### PEMBAHASAN

**HASIl**

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan yang signifikan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia. Analisis data sekunder mengungkap bahwa ketika tingkat korupsi semakin tinggi, sektor-sektor ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Terutama, sektor-sektor yang sangat tergantung pada perizinan, regulasi, dan pengelolaan sumber daya alam, seperti sektor pertambangan, tampaknya lebih rentan terhadap dampak negatif korupsi. Data juga menunjukkan bahwa perbaikan dalam indeks persepsi korupsi biasanya berkorelasi positif dengan peningkatan pertumbuhan sektor ekonomi. Ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan korupsi mungkin berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di sektor-sektor utama.

Namun, dari hasil analisis regresi, ditemukan bahwa korupsi memberikan efek negatif namun tidak berarti signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena hubungannya bersifat tidak langsung. Temuan ini konsisten dengan riset yang dikerjakan oleh Dzhumashev (2009), yang mengungkap bahwa korupsi berdampak negatif tapi tidak secara langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Alasan negatifnya hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi adalah karena korupsi dapat menurunkan produktivitas seiring dengan ketidak-efisienan dan ketidak-efektifan dalam produksi. Penurunan produktivitas ini juga terkait dengan kualitas dan efektivitas institusi, khususnya dalam konteks kualitas dan efisiensi layanan publik yang disediakan oleh entitas pemerintah dan pejabat berwenang. (Widyaningsih, 2022)

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan anti-korupsi yang efektif dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Hasil ini dapat memberikan panduan berharga bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada peningkatan integritas institusi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien. Dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi, berbagai langkah untuk mengurangi korupsi dan memperbaiki tata kelola ekonomi akan menjadi penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

**PEMBAHASAN**

Sepanjang tahun 2014, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat adanya lonjakan signifikan dalam kasus korupsi di Indonesia. Pada semester pertama tahun itu, tercatat 308 kasus korupsi dengan 659 tersangka dan kerugian negara mencapai Rp3,7 triliun. Sedangkan pada semester kedua, terjadi 321 kasus dengan 669 tersangka dan kerugian negara Rp1,59 triliun. Totalnya, pada tahun 2014 terjadi 629 kasus, dengan 1.328 tersangka dan kerugian negara Rp5,29 triliun. Sebagai perbandingan, pada 2013 terdapat 560 kasus dan 1.271 tersangka. Tahun 2010 mencatat 448 kasus dengan 1.157 tersangka, 2011 sebanyak 436 kasus dengan 1.053 tersangka, dan 2012 mencatat 401 kasus dengan 877 tersangka. Korupsi telah menciptakan kekacauan di sektor publik, mempengaruhi aliran investasi publik menuju proyek-proyek yang menawarkan lebih banyak kesempatan untuk pemberian suap. Hal ini mengakibatkan pejabat meningkatkan tingkat kerumitan proyek untuk menutupi tindakan korupsi mereka. Selain itu, korupsi menurunkan standar layanan pemerintah dan kualitas infrastruktur, membebani anggaran pemerintah, meningkatkan biaya barang dan jasa, serta menghasilkan anggaran yang kurang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Junaidi & Patra, 2018)

Korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perkembangan suatu negara, terutama pada perekonomiannya. Ada lima dampak signifikan dari korupsi terhadap ekonomi: (Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023)

1. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat korupsi yang tinggi berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Meski ada pandangan bahwa korupsi bisa mempermudah bisnis, pada kenyataannya, korupsi justru merusak perekonomian dengan mengurangi pendapatan negara, menciptakan monopoli tidak sehat, dan merusak kepercayaan investor.

1. Menurunkan Investasi

Korupsi menyebabkan penurunan tingkat investasi, terutama dari investor asing, karena mereka khawatir akan biaya tambahan akibat pungutan liar dan suap. Selain itu, negara dengan korupsi tinggi sering kali menarik investor yang tidak etis.

1. Merendahkan Kualitas Infrastruktur

Akibat korupsi, alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur sering kali tidak tepat atau bahkan dikorupsi. Hal ini menghasilkan infrastruktur yang berkualitas rendah, yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan membahayakan keselamatan masyarakat.

1. Menciptakan Ketimpangan Ekonomi

Korupsi memperlebar kesenjangan antara orang kaya dan miskin. Orang kaya yang memiliki pengaruh cenderung menggunakan kekuasaannya untuk memperkaya diri, sementara orang miskin semakin tertekan.

1. Meningkatkan Kemiskinan

Semua dampak korupsi yang dijelaskan sebelumnya pada akhirnya menyebabkan meningkatnya kemiskinan. Korupsi mempersempit peluang bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

Ironisnya, negara-negara miskin cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi, menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan dan korupsi. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan antikorupsi dianggap sebagai salah satu solusi yang dapat diterapkan.

Pembahasan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keterkaitan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia adalah dinamis dan memerlukan perhatian khusus. Analisis data sekunder memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana tingkat korupsi dapat mempengaruhi sektor-sektor utama ekonomi. Sebagian besar temuan menunjukkan bahwa ketika tingkat korupsi tinggi, sektor-sektor yang bergantung pada perizinan dan regulasi, seperti sektor pertambangan, mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Ini sejalan dengan pandangan umum bahwa korupsi dapat menciptakan hambatan birokrasi dan proses perizinan, yang merugikan investasi dan perkembangan sektor ekonomi.

Secara khusus, sektor pertambangan muncul sebagai salah satu sektor yang paling rentan terhadap dampak negatif korupsi. Dengan tingginya keterlibatan birokrasi dalam izin dan regulasi, praktik-praktik korupsi dapat meningkatkan biaya produksi dan menghambat potensi pertumbuhan sektor ini. Pentingnya perizinan dan pengelolaan sumber daya alam dalam sektor ini membuatnya menjadi fokus utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi. Oleh karena itu, perbaikan dalam tata kelola sektor pertambangan dan peningkatan transparansi dalam kebijakan sumber daya alam dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan konsep "grease of the wheel" yang dikemukakan oleh Leff (1964), Leys (1965), dan Huntington (1968), korupsi dapat meningkatkan efisiensi di negara-negara dengan pemerintahan yang tidak efisien. Menurut mereka, korupsi dapat menjadi solusi untuk mengatasi birokrasi yang lamban dan tata kelola yang lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Méon & Weill (2010) di 69 negara menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak positif terhadap efisiensi di tempat dengan tata kelola yang buruk. Namun, hasil penelitian Dwiputri et al. (2019) di Asia menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu korupsi cenderung meningkatkan inefisiensi ketika sistem pemerintahan kurang baik. Selain itu, kombinasi antara tingkat korupsi yang tinggi dengan pemerintahan yang lemah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, dan mengurangi pertumbuhan modal, menunjukkan korupsi sebagai penghambat. (Widyaningsih, 2022)

Hasil penelitian juga menyoroti dampak positif dari peningkatan integritas dan upaya pencegahan korupsi terhadap pertumbuhan sektor-sektor ekonomi. Ketika terjadi perbaikan dalam indeks persepsi korupsi, sektor-sektor utama ekonomi cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Faktor ini memberikan dorongan tambahan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengintensifkan upaya dalam mengurangi korupsi dan meningkatkan tata kelola ekonomi secara keseluruhan. Langkah-langkah seperti reformasi perizinan, perbaikan sistem pengawasan, dan peningkatan transparansi dapat menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi.

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan bagi kebijakan ekonomi di Indonesia. Dengan memahami dinamika keterkaitan antara korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama, pemerintah dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan lembaga pengawasan dapat menjadi kunci dalam meminimalkan dampak negatif korupsi pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk advokasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mendorong perubahan positif menuju tata kelola yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini memberikan dasar yang kokoh untuk pengembangan kebijakan yang dapat memperkuat peran sektor-sektor utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Penting juga untuk mengakui bahwa upaya untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tata kelola ekonomi memerlukan komitmen jangka panjang dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pemerintah harus memprioritaskan reformasi birokrasi, transparansi, dan penegakan hukum yang ketat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat. Sementara itu, sektor swasta perlu berperan aktif dalam mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi dan mendukung upaya pencegahan korupsi. Masyarakat sipil, di sisi lain, memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan dan memastikan akuntabilitas pemerintah. Melalui kerjasama yang kuat antara semua pihak, Indonesia dapat mengatasi masalah korupsi dan memacu pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi, membuka peluang bagi kesejahteraan ekonomi yang lebih besar bagi seluruh masyarakat.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Penelitian ini mengungkap keterkaitan signifikan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi utama di Indonesia. Sebagai contoh, sektor yang sangat tergantung pada perizinan, regulasi, dan pengelolaan sumber daya alam, seperti pertambangan, terpengaruh signifikan oleh korupsi. Meskipun korupsi memberi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hubungannya bersifat tidak langsung dan kompleks. Penting untuk menerapkan kebijakan anti-korupsi yang efektif dan transparan dalam pengelolaan sumber daya alam agar mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, komitmen jangka panjang dan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil diperlukan untuk mengatasi masalah korupsi dan memacu pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia.

1. **Saran**

Dari hasil penelitian yang mendalam tentang keterkaitan antara tingkat korupsi dan pertumbuhan sektor-sektor utama ekonomi di Indonesia, disarankan agar pemerintah Indonesia memperkuat reformasi birokrasi dan meningkatkan transparansi dalam setiap sektor ekonomi, khususnya yang bergantung pada perizinan dan regulasi. Penekanan khusus harus diberikan pada sektor-sektor yang paling rentan terhadap dampak korupsi, seperti sektor pertambangan. Selain itu, kerjasama aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif. Adalah penting bagi sektor swasta untuk berkomitmen pada etika bisnis yang tinggi dan mendukung upaya pencegahan korupsi, sementara masyarakat sipil harus terus mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah. Seiring dengan upaya-upaya tersebut, pendidikan antikorupsi harus diperluas dan diperdalam agar menciptakan kesadaran dan komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Akman, B., & Sapha, D. (2018). Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, *3*(4), 531–538.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Haqiqi, A. H., & Putra, H. A. D. (2020). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, *5*. https://doi.org/10.31002/rep.v5i2.2325

Haqmi, I. B. (2019). *Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asean* [Skripsi]. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA.

Nawatmi, S. (2014). Dampak Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana*.

Junaidi, & Patra, I. K. (2018). Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, *3*(1).

Pusat Edukasi Antikorupsi. (2023, January 13). *Kupas Tuntas 5 Dampak Buruk Korupsi terhadap Perekonomian Negara*. Pusat Edukasi Antikorupsi.

Rachmawati, A. F. (2021). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, *1*(1), 12–19.

Widyaningsih, T. (2022). *Pengaruh Korupsi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus: Tujuh Negara Asean Tahun 2016-2020)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.